



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

*kecamatan Somagede
Kabupaten Banyumas*



DAFTAR ISI

BAB I	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1. LATAR BELAKANG.....	3
1.2. LANDASAN HUKUM.....	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4. SISTEMATIKA	6
BAB II.....	9
A. Penetapan Indikator Kinerja.....	10
B. Capaian Analisis Kinerja.....	10
C. Evaluasi Program Tahun 2024	12
BAB III.....	30
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	30
BAB IV	41
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan.

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Rancangan Akhir Renstra maupun RKPD tersebut, setiap Organisasi Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Banyumas menyusun Rencana Kerja yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada tahun tertentu.

Renja Tahun 2026 merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD 2026 yang disertai dengan upaya mendukung percepatan pencapaian target maupun mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum ABPD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA) sampai Renja Tahun 2026 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.

Sesuai dengan hal tersebut maka Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Kecamatan Somagede

Kabupaten Banyumas Tahun 2026 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Banyumas No 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
24. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana kerja Kecamatan Somagede Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2026 yang mengacu pada Rancangan Akhir Renstra 2025-2029 dan RKPD 2026
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Somagede Tahun 2026;
3. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Renja Kecamatan Somagede dengan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Somagede untuk memberikan arahan sekaligus pedoman bagi unit kerja dalam lingkup Kecamatan Somagede dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan kewenangan.

1.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan

analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Bagian ini memuat uraian mengenai berbagai bentuk inovasi yang telah, sedang, atau direncanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Bagian ini memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah

Bagian ini memuat perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan kegiatan

berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menguraikan secara detail Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Menguuraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan Somagede adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Somagede. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Somagede ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Somagede selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan target kinerja Kecamatan Somagede Tahun 2024 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024, yang digunakan sebagai bahan evaluasi dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Somagede Tahun 2026. Adapun capaian kinerja keuangan dilihat dari realisasi keuangan dan indikator kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Keuangan Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Tahun 2024

Program	Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.335.175.504	2.108.642.601	90,27
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	17.765.000	17.740.000	100
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	18.910.000	18.910.000	100

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5.305.000	5.305.000	100
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	32.410.000	32.390.000	100
6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	67.750.000	67.745.000	100
Jumlah	2.477.315.504	2.250.732.601	

Sumber : Data diolah Kecamatan Somagede

Dari Tabel 2.1 tersebut, secara umum dapat diketahui bahwa capaian kinerja dilihat dari realisasi keuangan Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2024 mendekati angka 100%. Dari keenam Program, ada 5 program yang capaiannya 100%. Ada 1 program yang capaiannya 90 % yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal tersebut disebabkan karena pagu anggaran di DPA lebih besar dari realisasi, seperti belanja pegawai yakni Gaji dan Tunjangan, hal tersebut disebabkan karena jumlah pegawai yang menerima gaji dan Tunjangan ASN tahun berjalan berjumlah 12 orang dan Camat masih Plt., selain itu ada pegawai yang pensiun sehingga anggaran tidak terserap dengan baik.

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas telah melaksanakan seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu terdiri dari 6 program dan 13 kegiatan. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang diampu Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Evaluasi Hasil Kinerja Kecamatan Somagede Tahun 2024

Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (100%)	Capaian Kinerja
Tujuan					
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas					
Persentase capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	%	100	91.91	91.91	Tidak Tercapai
Sasaran					

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan						
	Persentase capaian kinerja pelayanan Pemerintah Kecamatan	%	100	100.16	100.16	Tercapai
Sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan						
	Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	Nilai	80.80	83.65	104.56	Tercapai
Program 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang urusan Perangkat Daerah						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,6	80.80	103.53	Tercapai
Program 2 : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
Meningkatnya Pendampingan kecamatan dalam perencanaan dan Pengelolaan anggaran Desa						
	Persentase APBdes tepat waktu	%	100	100	100	Tercapai
Program 3 : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
Meningkatnya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat						
3.	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100	Tercapai
Program 4 : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum						
Meningkatnya Pencegahan Ganggguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan						
	Persentase Penanganan gangguan Trantibumlinmas	%	100	100	100	Tercapai
Program 5 : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kelurahan						
Meningkatnya Fasilitas Kecamatan dalam meningkatkan partisipasi Lembaga Masyarakat						
	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100	Tercapai
Rata – Rata Capaian					100	Tercapai

C. Evaluasi Program Tahun 2024

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Somagede Tahun 2024 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.438.915.200,- Penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.250.732.601 (90%). Program

dengan serapan terbesar pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 100% dan Serapan terkecil ada pada program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 99.93%.

Kecamatan Somagede pada anggaran 2024 telah melaksanakan 6 program dan 13 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Gambaranya keberhasilan capaian tujuan, sasaran dan program ada pada tabel berikut:

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Banyumas

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Somagede

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026(Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2025 (tahun berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2025)	
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
Fungsi Penunjang									
Bidang Administrasi Pemerintahan									
[3] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
[4] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
[5] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
[5] Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	150%
[5] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	17 Unit	106,25%	16 Unit	16 Unit	100%

Renja 2026 Kecamatan Somagede

[5] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
[4] Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
[5] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket		4 paket	4 paket	100%	4 paket	4 paket	33%
[5] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	33%
						100%			33%
[5] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	33%
[5] Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket		12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	33%
[5] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	33%
[5] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	33%
[5] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	150%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
[4] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	33%
[5] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	33%
[5] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	33%
[5] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	25%
[4] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen		3 Dokumen	4 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	33%

[5] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	11%
[5] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
[4] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 %		100 %	96,16 %	96,16%	100 %	100 %	115%
[5] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/Bulan		13 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	92,31%	15 Orang/Bulan	15 Orang/Bulan	33%
[5] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
[2] Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	100 %		100 %	100,16 %	100,16%	100 %	100 %	100%
[3] PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
[4] Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	33%
[5] Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	33%
[5] Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	300%
[5] Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	6 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	300%
[5] Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	105%
[3] PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Indeks		91,75 Indeks	91,75 Indeks	100,82%	91,75 Indeks	91,75 Indeks	100%
[4] Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100%		100%	75%	75%	100%	100%	33%
[5] Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	75%	4 Laporan	4 Laporan	100%
[4] Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	33%

[5] Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
[4] Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	33%
[5] Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	36 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	33%
[5] Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	27 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	100%	9 Laporan	9 Laporan	100%
[3] PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan tranbubumlinmas	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
[4] Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	33%
[5] Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	33%
[5] Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
[3] PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
[4] Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase fasilitasi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
[5] Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyar akatan	4 Lembaga Kemasyar akatan	100%	4 Lembaga Kemasyaraka tan	4 Lembaga Kemasyarakatan	33%
[5] Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	150%	2 Laporan	2 Laporan	100%
[4] Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
[5] Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemsyarakatan		6 Lembaga Kemsyara katan	6 Lembaga Kemsyara katan	100%	6 Lembaga Kemsyarakat an	6 Lembaga Kemsyarakatan	33%
[5] Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	33%
[5] Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
[3] PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%

[4] Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100 %		100 %	150 %	150%	100 %	100 %	33%
[5] Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	135 Orang		45 Orang	45 Orang	100%	45 Orang	45 Orang	33%
[5] Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	200%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan di kabupaten banyumas adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di

- wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
3. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
 4. Koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
 5. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
 6. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - a. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

- yang melibatkan pihak swasta;
- c. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;
7. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
 - a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - b. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
 8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
 9. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - a. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 10. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
 11. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- B. Susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas terdiri dari:
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Somagede dalam masa Renstra 2024-2026 yang menggambarkan hasil tersaji berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008. Penjelasan dapat dilihat pada tabel T-C.30 berikut ini.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Somagede
Kabupaten Banyumas

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan			86	87	88	90.75	-	91	91.5	
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan			100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat			100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
2	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
	Persentase kegiatan pemberdayaan desa			100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

3	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas			100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan			100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
4	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan			100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan			100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
5	Persentase APBDes tepat waktu			100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan			100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan Somagede ada isu strategis di bidang Penyelenggaraan Pemerintah yaitu belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

1. **Koordinasi antara Perangkat Daerah:** Penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat berkomunikasi dengan baik. Koordinasi ini melibatkan berbagai aspek, termasuk alokasi sumber daya, pelaksanaan program, dan evaluasi hasil.
2. **Sinergi Program:** Perangkat Daerah kabupaten/kota dan kecamatan harus bekerja bersama untuk mengoptimalkan hasil pembangunan. Sinergi program memungkinkan penggabungan sumber daya dan upaya untuk mencapai tujuan bersama.
3. **Pengukuran Kinerja:** Perangkat Daerah perlu mengukur kinerja secara objektif. Ini melibatkan indikator-indikator yang relevan, seperti capaian target, efisiensi, dan dampak program.
4. **Partisipasi Masyarakat:** Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program adalah kunci sukses. Keterlibatan masyarakat memperkuat sinergi dan memastikan program sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Somagede menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk

menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Somagede Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. Strenght (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik.
2. SDM Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 19 orang. Dilihat dari pendidikan regular, pegawai Kecamatan Somagede sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah.
3. Sarana dan Prasarana
Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Somagede sudah cukup memadai, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.
4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah.

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah, Kecamatan Somagede juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Kurangnya jumlah ASN dan masih belum banyak yang menguasai IT
2. Masih kurangnya disiplin ASN
3. Masih sering terjadi tumpang tindih tupoksi
4. Kebersihan Kantor perlu ditingkatkan

C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di Peluang-peluang tersebut adalah

1. Pemberian beasiswa dari Pemda Banyumas untuk meningkatkan jenjang pendidikan.

2. Tersedianya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
3. Adanya kemauan dan keinginan dari karyawan dan karyawan untuk meningkatkan kemampuan.
4. Adanya Kerjasama dengan Desa atau pihak lain untuk menyediakan data yang dibutuhkan.
5. Adanya keinginan untuk menyusun perencanaan yang baik dari berbagai pihak.
6. Adanya dukungan dari masyarakat dan legislatif.
7. Adanya kebutuhan dan tuntutan akan pembangunan yang jelas dan terarah.
8. Semakin banyak pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat
9. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
10. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kecamatan yang lebih besar
11. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.

D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Ancaman yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Adanya aturan-aturan yang menghambat pengembangan karier pegawai.
2. Adanya bencana alam yang sering terjadi di Banyumas (tanah longsor, banjir, angin puting beliung).
3. Kurangnya etos kerja
4. Tingginya tingkat pengangguran
5. Tingginya jumlah penduduk miskin
6. Tingginya ancaman bencana
7. Rendahnya semangat kegotong royongan dan keswadayaan

A. *Tugas Kecamatan Somagede*

Kecamatan Somagede mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan

daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
3. Koordinator kegiatan pemberdayaan Masyarakat.
4. Koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
5. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
6. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum.
7. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.
9. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan.
10. Penyelenggaraan pelayanan administrasi dilingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi.
11. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan strategi kebijakan untuk tahun 2026 untuk tujuan sasaran berdasarkan Rankhir Renstra 2025-2029, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Somagede pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan

sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan SOP dan PATEN.
2. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Ancaman dalam Ketetraman, Ketertiban dan Kebencanaan
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Memberdayakan dan Membina Kader PKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
7. Melakukan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasaan APBDes
8. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan.
9. Mewujudkan ASN yang melek teknologi informasi khususnya terkait aplikasi yang berhubungan dengan E-Office

C. Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat
2. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan Desa
3. Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Desa
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Desa dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang
5. Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.
6. Pembersihan Sampah Liar dan Fasilitasi kebersihan lingkungan dengan

- mengadakan even- even lintas sektoral dalam menjaga lingkungan hidup
7. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes.
 8. Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak
 9. Pengiriman ASN ke berbagai Diklat maupun pelatihan yang terkait Aplikasi dalam Subbag Umum dan kepegawaian maupun Perencanaan dan Keuangan

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal RKPD Kecamatan Somagede telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Somagede guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rancangan Renja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan Awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/ tolok ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/ kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Somagede dan Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan pembiayaan penerimaan daerah berikut pendanaan indikatif. Pada rancangan awal pagu anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 2.941.652.000,- pada tahap akhir analisis kebutuhan sebesar Rp. 2.941.652.000,-

Table T-C. 31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banyumas

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Somagede

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Somagede	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	2.757.404.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Somagede	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	2.757.404.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Somagede	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	4 dokumen	1.680.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Somagede	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	4 dokumen	1.680.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Somagede	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	840.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Somagede	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	840.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	840.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	840.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Somagede	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	2.234.834.722	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Somagede	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	2.234.834.722	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Somagede	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/bulan	2.209.154.722	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Somagede	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/bulan	2.209.154.722	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Somagede	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	25680000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Somagede	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	25680000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Somagede	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%	128.962.153	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Somagede	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%	128.962.153	
	Penyediaan Komponen Instalasi	Kec. Somagede	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4 paket	639.000	Penyediaan Komponen Instalasi	Kec. Somagede	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	4 paket	639.000	

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bangunan Kantor yang Disediakan			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Somagede	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	33.525.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Somagede	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	33.525.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Somagede	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.336.153	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.336.153	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Somagede	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	53.552.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	53.552.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Somagede	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6.205.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6.205.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	25.852.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	25.852.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Somagede	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	6.853.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	6.853.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Somagede	Persentase Pengadaan Barang	100%	17.744.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang	100%	17.744.000,00	
	Pengadaan Mebel	Kec. Somagede	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	4.500.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	4.500.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Somagede	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	8.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	8.000.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Somagede	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	5.244.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	5.244.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Somagede	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100 %	344.181.125,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100 %	344.181.125,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.367.500,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.367.500,00	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	37.200.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	37.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	263.613.625,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	263.613.625,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Somagede	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	30.002.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Somagede	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	30.002.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Somagede	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	21.274.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Somagede	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	21.274.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Somagede	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.824.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Somagede	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.824.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Somagede	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	800.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Somagede	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	800.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Somagede	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.104.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Somagede	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.104.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Somagede	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang terselesaikan	100 %	42.150.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Somagede	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang terselesaikan	100 %	42.150.000,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Somagede	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100 %	11.100.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Somagede	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100 %	11.100.000,00	

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	3.600.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	3.600.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Somagede	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	7.500.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Somagede	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	7.500.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Somagede	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	100 %	7.500.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Somagede	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	100 %	7.500.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	7.500.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	7.500.000,00	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Somagede	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100 %	5.000.000,00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Somagede	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100 %	5.000.000,00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Somagede	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	5.000.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Somagede	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	5.000.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Somagede	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	18.550.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Somagede	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	18.550.000,00	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	8.050.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	8.050.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9 Laporan	10.500.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9 Laporan	10.500.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Somagede	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	53.940.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Somagede	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	53.940.000,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Somagede	Persentase pemberdayaan masyarakat desa	100 %	33.100.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Somagede	Persentase pemberdayaan masyarakat desa	100 %	33.100.000,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Somagede	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Somagede	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Somagede	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	15.100.000,00	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Somagede	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	15.100.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	10.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	10.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Somagede	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	100 %	20.840.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Somagede	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	100 %	20.840.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Somagede	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	12.090.000,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Somagede	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	12.090.000,00	

	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	8.750.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	8.750.000,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Somagede	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	25.900.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Somagede	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	25.900.000,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Somagede	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	6 Laporan	20.650.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Somagede	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	6 Laporan	20.650.000,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	14.950.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	14.950.000,00	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	5.700.000,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	5.700.000,00	
	Koordinasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Somagede	Persentase penerapan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100 %	5.250.000,00	Koordinasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Somagede	Persentase penerapan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100 %	5.250.000,00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan	5.250.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Somagede	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan	5.250.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Somagede	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	29.625.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Somagede	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	29.625.000,00	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Somagede	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	8 Laporan	29.625.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Somagede	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	8 Laporan	29.625.000,00	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Somagede	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	7.125.000,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Somagede	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	7.125.000,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Somagede	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	22.500.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Somagede	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	22.500.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Somagede	Persentase Fasilitas Penyusunan APBDes sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tepat waktu	100 %	24.470.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Somagede	Persentase Fasilitas Penyusunan APBDes sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tepat waktu	100 %	24.470.000,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Somagede	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100 %	24.470.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Somagede	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100 %	24.470.000,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Somagede	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	5.125.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Somagede	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	5.125.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	5.050.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Somagede	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	5.050.000,00	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Somagede	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	3.720.000,00	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Somagede	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	3.720.000,00	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM KEGIATAN MASYARAKAT

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal Bottom Up yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Tingkat Kabupaten. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan Top Down dari kunjungan kerja Bupati dan Reses DPRD.

Kecamatan Somagede saat ini tidak menambah usulan program dan kegiatan berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat biasanya berkaitan dengan kegiatan teknis Perangkat Daerah di luar Kecamatan, namun perencanaan KUA dan PPAS tetap dilaksanakan oleh Bappedalitbang sebagai Perangkat Daerah Perencana di Kabupaten Banyumas semua kegiatan Perangkat Daerah baik dari musrenbang/ masyarakat maupun usulan dari Dinas/ Lemtekda/ Badan/ Kecamatan dan Desa.

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Banyumas

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Somagede

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indicat or Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	-	-	-

2.6 INOVASI PERANGKAT DAERAH

Inovasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pemasukan atau pengenalan hal-hal baru, pembaruan, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat) atau unsur yang mengalami pembaharuan dalam bahasa modern.

Inovasi “KENDENG BERGEMA SERAYU SEMANGER” adalah

pengembangan yang telah diperkenalkan kepada Masyarakat pada tanggal 07 Maret 2023 pada acara sosialisasi Inovasi dan “Kendeng bergema serayu semanger” bertempat di aula Bumiredjo Kecamatan Somagede dengan melibatkan Dinas Kabupaten Banyumas, Forkompimkec Somagede, Lembaga Pendidikan, Kepala Desa, Pelaku Seni kerjina dan lainnya.

Didukung oleh Keputusan Bupati Nomor : 473.3/316/Tahun 2023 tentang penetapan program inovasi Kendeng bergema serayu semanger (Bergerak Bersama Gelorakan Semangat MemangunWisata Pegunungan Kendeng dan Kawasan Sungai Serayu) sebagai Inovasi Kecamatan Somagede dan Keputusan Bupati Nomor : 473.3/336/Tahun 2023 tentang Forum Komunikasi Masyarakat peduli Wisata Pegunungan Kendeng dan Kawasan Sungai Serayu Kecamatan Somagede.

Kendeng bergema Serayu Semanger adalah memberikan informasi tentang upaya yang telah dilakukan Kecamatan Somagede dalam menerapkan program dan berbagai Inovasi sebagai bentuk tanggung jawab agar Daerah Pegunungan Kendeng dan Sungai Serayu dapat lebih dimanfaatkan potensi yang ada.

Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya “Pesona Desa Klinting” yaitu Upaya strategis mempromosikan dan membangkitkan potensi wisata Desa, dengan melibatkan berbagai elemen Masyarakat serta kerja sama lintas sektor. Rangkaian acara yang diselenggarakan meliputi bazar UMKM, festival hadroh, senam massal, sendratari “Babad Watu Lintang” pawai budaya,serta pentas seni tradisional kuda lumping dan lengger. Acara tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan tetapi juga sebagai bentuk pelsetarian budaya local dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat melalui pariwisata dan ekonomi kreatif.

Selanjutnya Kedepan Kecamatan Somagede akan membuat inovasi MASGANA (Linmas Siaga Bencana) berfokus penanganan Segala Macam masalah Keamanan dan Ketertiban di wilayah Somagede.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas pembangunan daerah tahun 2026 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2026 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Selain itu prioritas pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

RKP Tahun 2026 merupakan penjabaran dari dokumen RPJMN 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 didasarkan atas Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Tahun 2025-2029, yaitu “*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Misi pembangunan/ Asta Cita, yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional. Prioritas Nasional tersebut antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan

dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 disusun pentahapan fokus kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan pada tahun 2026 fokus diarahkan pada kebijakan “Meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional”. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kebijakan tersebut antara lain:

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. penguatan sistem agroforestry berbasis potensi lokal;
5. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (large scale food fortification/LSFF);
8. pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste).

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 juga diarahkan untuk “Penguatan Landasan Pembangunan Daerah” dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah yaitu:

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis.

2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan.
3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Rencana pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2026 disusun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD. Adapun visi yang ditetapkan adalah: *“Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera.”* Perwujudan visi tersebut dijabarkan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan menyejahterakan;
3. Memperkuat ketahanan pangan;
4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah berintegritas, adaptif, dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah;
6. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 diarahkan untuk *“Penyiapan penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk peningkatan kualitas SDM dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang adaptif”*. Secara keseluruhan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2026 diprioritaskan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu secara inklusif
- b. Meningkatkan budaya literasi, pengelolaan olahraga dan kebudayaan Banyumas untuk penguatan Karakter Sumber Daya Manusia yang unggul
- c. Meningkatkan pembangunan keluarga yang memperhatikan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, kesetaraan gender, pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat secara inklusif, serta peningkatan peran aktif pemuda

- d. Meningkatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pelaku ekonomi
- e. Penguatan Implementasi regulasi yang hijau dan adaptif
- f. Meningkatkan pengembangan produk potensial dan produk unggulan serta penguatan sarana dan prasarana pendukung
- g. Meningkatkan penanganan kemiskinan dan pelayanan perlindungan sosial secara terintegrasi
- h. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan penurunan pengangguran
- i. Memperkuat Ketahanan Pangan Lokal dengan peningkatan produksi dan produktivitas pangan serta pengembangan pangan lokal
- j. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan konektivitas serta instrumen pendukung yang memadai dan berkelanjutan
- k. Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi mendukung Reformasi Birokrasi
- l. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah secara berkelanjutan

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran dilakukan untuk merespons isu-isu strategis yang telah diidentifikasi. **Kecamatan Somagede**, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bertanggung jawab membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Publik.

Rencana pembangunan disusun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD. Adapun visi yang ditetapkan adalah: *“Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera.”* Perwujudan visi tersebut dijabarkan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan menyejahterakan;

3. Memperkuat ketahanan pangan;
4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah berintegritas, adaptif, dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah;
6. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 diarahkan untuk “*Penyiapan penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk peningkatan kualitas SDM dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang adaptif*”.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja **Kecamatan Somagede** Kabupaten Banyumas Tahun 2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis **Kecamatan Somagede** Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:. Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Somagede beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN
<i>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas</i>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah
	Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan

Sumber : Data diolah Kecamatan Somagede

Indikator dari tujuan sebagaimana dimaksud diatas adalah persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah kecamatan. Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas didapatkan dengan rumus $50\% \times \text{capaian sasaran pelayanan kecamatan} + 50\% \times \text{capaian akuntabilitas kecamatan}$. Nilai hasil persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah kecamatan tahun 2023 dan

2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan

Indikator	Tahun	
	2023	2024
Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	97.38	90.28
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	100	98.15
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	82.7	82.4

Sumber : Data diolah Kecamatan Somagede

Kemudian, target Tujuan dan Sasaran pada Renja Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Tahun 2026

Tujuan/Sasaran/Indikator		Satuan	Target Kinerja Tahun 2026
Tujuan			
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas			
	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	%	100
Sasaran			
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan			
	Persentase capaian kinerja pelayanan Pemerintah Kecamatan	%	100

Sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan			
	Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	Nilai	80

Sumber : Data diolah Kecamatan Somagede

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa Tujuan Kecamatan Somagede adalah **“Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas”** dengan sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan

Pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kecamatan, dengan indikator persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan.

Untuk capaian kinerja pelayanan pemerintah Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan 2022 s.d 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	100
Tahun 2023				
Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	100
Tahun 2024				
Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan	%	100	100	100

Sumber : Data diolah Kecamatan Somagede

2. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan

Pada sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan dengan indikator Nilai SAKIP pemerintah kecamatan.

Untuk capaian akuntabilitas pemerintah Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dalam 2 (dua) tahun terakhir, dapat dilihat dari Nilai SAKIP dalam 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
 Nilai SAKIP Tahun 2023 dan 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023				
Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	Nilai	NA	88.80	80.80
Tahun 2024				
Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	Nilai	79.6	83.65	83.65

Sumber : Data diolah Kecamatan Somagede

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan Perangkat Daerah kami dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah juga ada pertimbangan lain seperti:

- a. Pencapaian SDGs,
- b. Pengentasan kemiskinan,
- c. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Kecamatan Somagede mempunyai 6 Program 13 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 5 bidang dan sekretariat. Berikut adalah total kebutuhan dana tahun 2026 yaitu sebesar Rp. 2.933.489.000,- dengan sumber dana APBD Kabupaten. Berikut lampiran rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2026 pada tabel T-C. 33.

Tabel T.C 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Banyumas

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Somagede

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	
						Kecamatan Somagede			2.933.489.000,00				2.695.958.500,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.933.489.000,00				2.695.958.500,00	
	7	01				KECAMATAN			2.933.489.000,00				2.695.958.500,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.757.404.000,00			-	2.421.188.500,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.680.000,00			-	2.821.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	840.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1.255.000,00	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	840.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1.566.000,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 %	2.234.834.722,00			-	1.749.101.793,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

						<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	13 Orang/bulan	2.209.154.722,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.728.221.793,00
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
						<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	4 Dokumen	25.680.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		20.880.000,00
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum</i>	100 %	128.962.153,00		-	208.760.207,00
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	639.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2.394.000,00
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	33.525.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		34.534.040,00
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	4 Paket	2.336.153,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		3.171.000,00
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	53.552.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		64.765.000,00
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
						<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	6 Paket	6.205.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		18.031.167,00
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						

						<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	25.852.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		73.365.000,00
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	2 Dokumen	6.853.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		12.500.000,00
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang</i>	100 %	17.744.000,00		-	34.089.000,00
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						
						<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	2 Unit	4.500.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		14.089.000,00
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	8.000.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000,00
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	5.244.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan</i>	100 %	344.181.125,00		-	376.666.500,00
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
						<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	43.367.500,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		40.183.000,00
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Laporan	37.200.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		11.000.000,00
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						

						<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	263.613.625,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		325.483.500,00
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	30.002.000,00			-	49.750.000,00
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	10 Unit	21.274.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		21.000.000,00
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	10 Unit	6.824.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		16.250.000,00
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	800.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000,00
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	1.104.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		7.500.000,00
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan		42.150.000,00			-
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan</i>	100 %	11.100.000,00			11.100.000,00
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						

							<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	2 Laporan	3.600.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		3.600.000,00
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
							<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	2 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		7.500.000,00
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan</i>	100 %	7.500.000,00			-	7.500.000,00
	7	01	02	2.04	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
							<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan	7.500.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		7.500.000,00
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<i>Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum</i>	100 %	5.000.000,00			-	5.000.000,00
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum							
							<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000,00
7	01	02	2	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>	100 %	18.550.000,00			-	27.350.000,00

7	01	02	2	04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	8.050.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		8.250.000,00
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9 Laporan	10.500.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		19.100.000,00
	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			53.940.000,00			-	98.320.000,00
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa	100 %	33.100.000,00			-	53.820.000,00
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		18.820.000,00
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	15.100.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000,00
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000,00

33.1

	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat</i>	100 %	20.840.000,00			-	44.500.000,00
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							
							<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	4 Lembaga K emasyarakatan	12.090.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		32.500.000,00
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							
							<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>	4 Laporan	8.750.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		12.000.000,00
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			25.900.000,00			-
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan</i>	6 Laporan	20.650.000,00			-	27.000.000,00
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
							<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	4 Laporan	14.950.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		22.500.000,00
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							

							<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	2 Laporan	5.700.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		4.500.000,00
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</i>	100 %	5.250.000,00			-	12.500.000,00
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							
							<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	6 Laporan	5.250.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		12.500.000,00
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			29.625.000,00			-	28.500.000,00
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Ditugaskan	8 Laporan	29.625.000,00			-	28.500.000,00
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
							<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	50 Orang	7.125.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		6.000.000,00
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
							<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	6 Dokumen	22.500.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		22.500.000,00
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			24.470.000,00			-

	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase desa yang mendapatkan pendampingan</i>	100 %	24.470.000,00			-	57.500.000,00
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa							
							<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	12 Dokumen	5.050.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000,00
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa							
							<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	2 Dokumen	3.720.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		7.500.000,00
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya							
							<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	6 Laporan	10.575.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		12.500.000,00
	J U M L A H								2.933.489.000,00				2.695.958.500,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2026 ditunjukkan pada lampiran matrik renja sebagai berikut:

Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	8	9	10	11
						Kecamatan Somagede			2.933.489.000,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.933.489.000,00		
	7	01				KECAMATAN			2.933.489.000,00		
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.757.404.000,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.680.000,00		
	7	01	01	2.01	0001						PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	840.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	7	01	01	2.01	0007						PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	840.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 %	2.234.834.722,00		
	7	01	01	2.02	0001						

							<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	13 Orang/bulan	2.209.154.722,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02	0002						
							<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	4 Dokumen	25.680.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum</i>	100 %	128.962.153,00		
	7	01	01	2.06	0001						
							<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	639.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0002						
							<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	33.525.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0003						
							<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	4 Paket	2.336.153,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0004						
							<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	53.552.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0005						

							<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	6 Paket	6.205.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0009						
							<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	25.852.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0010						
							<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	2 Dokumen	6.853.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang</i>	100 %	17.744.000,00		
	7	01	01	2.07	0005						
							<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	2 Unit	4.500.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.07	0006						
							<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	8.000.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.07	0010						
							<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	5.244.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan</i>	100 %	344.181.125,00		
	7	01	01	2.08	0002						

						<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	43.367.500,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	01	01	2.08	0003		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Laporan	37.200.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	01	01	2.08	0004		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	263.613.625,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	30.002.000,00		
7	01	01	2.09	0002		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	10 Unit	21.274.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	01	01	2.09	0006		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	10 Unit	6.824.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	01	01	2.09	0009		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	800.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	01	01	2.09	0011		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	1.104.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)

2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan			42.150.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan</i>	100 %	11.100.000,00		
	7	01	02	2.01	0001		<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	2 Laporan	3.600.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	02	2.01	0002		<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	2 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan</i>	100 %	7.500.000,00		
	7	01	02	2.04	0003		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan	7.500.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<i>Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum</i>	100 %	5.000.000,00		
	7	01	02	2.03	0001						

							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	01	02	2	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 %	18.550.000,00		
7	01	02	2	04	0002						
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	8.050.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	02	2.04	0003						
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9 Laporan	10.500.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			53.940.000,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa	100 %	33.100.000,00		
	7	01	03	2.01	0001	33.100.000,00					
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)

	7	01	03	2.01	0002		<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>	4 Dokumen	15.100.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.01	0003						
							<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat</i>	100 %	20.840.000,00		
	7	01	03	2.03	0002						
							<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	4 Lembaga Kemasyarakatan	12.090.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.03	0004						
							<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>	4 Laporan	8.750.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)

4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			25.900.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan</i>	6 Laporan	20.650.000,00		
	7	01	04	2.01	0001						
							<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	4 Laporan	14.950.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	04	2.01	0002						
							<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	2 Laporan	5.700.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</i>	100 %	5.250.000,00		
	7	01	04	2.02	0001						
							<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	6 Laporan	5.250.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			29.625.000,00		

	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Ditugaskan	8 Laporan	29.625.000,00		
	7	01	05	2.01	0002						
							<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	50 Orang	7.125.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	05	2.01	0008						
							<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	6 Dokumen	22.500.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			24.470.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase desa yang mendapatkan pendampingan</i>	100 %	24.470.000,00		
	7	01	06	2.01	0002						
							<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa</i>	12 Dokumen	5.050.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	06	2.01	0008						
							<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	2 Dokumen	3.720.000,00	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)

	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					
							<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	6 Laporan	10.575.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
	J U M L A H								2.933.489.000,00		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Kecamatan Somagede adalah **Program Tahunan** Kecamatan Somagede yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Kecamatan Somagede. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Somagede selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Somagede. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Somagede. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Somagede sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Somagede, 13 Agustus 2025

CAMAT SOMAGEDE
KABUPATEN BANYUMAS



MISNURAINI, S.STP
NIP.197806051997032003

Lampiran : Register Resiko Kecamatan Somagede

No	Sasaran/Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak Yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a				b	c			d	E	f	g	h	i
1	Risiko Strategis												
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan		Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Menurunnya nilai SAKIP	Belum tersusunnya SOP evaluasi kinerja harian	1. Kinerja Kecamatan menjadi kurang akuntabel 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Kecamatan	1. Kecamatan 2. Masyarakat	Menjalin koordinasi dan kolaborasi antar bidang	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengadakan forum komunikasi secara rutin antar bidang	Kepala OPD	Tahun 2026
2	Risiko Operasional;												
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa		Persentase APBDes tepat waktu	Adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBDes	Pengawasan telah dilaksanakan namun selalu ada celah	Timbulnya penyalahgunaan penggunaan anggaran yang semestinya	1. Masyarakat 2. Kasi Pemdes	Pendampingan dan pengawasan secara berkala dalam pengelolaan APBDes	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengintensifkan pendampingan dan pengawasan secara berkala dalam pengelolaan APBDes	Kasi Pemerintahan Desa	Triwulan 2, 3 Tahun 2026
	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan		Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	Adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1. Kurangnya pencegahan gangguan trantibum 2. Kondisi alam yang tidak bisa diprediksi	Timbulnya rasa tidak aman dan nyaman dalam masyarakat	1. Masyarakat 2. Kasi Trantib	Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan trantibum	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan trantibum	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Triwulan 2, 3 Tahun 2026